

PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN TRANSPARANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DI KABUPATEN NABIRE

Yonius Mirip¹, Popi Fauziati²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

Email: yoniusmirip030@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan transparansi kinerja instansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas keuangan di Kabupaten Nabire. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling pada instansi pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Otsus yaitu Bappeda Kabupaten Nabire. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan software EViews.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengelolaan anggaran Dana Otsus berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan (sig. 0,044 < 0,05). Sementara itu, transparansi kinerja instansi pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan (sig. 0,521 > 0,05). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,189 menunjukkan bahwa hanya 18,9% variasi akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagai instrumen fiskal strategis dalam pembangunan daerah. Selain itu, transparansi kinerja perlu diikuti dengan sistem pengawasan dan implementasi yang lebih kuat agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Otonomi Khusus, Transparansi Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Special Autonomy Fund (Otsus) budget management and the transparency of local government agency performance on financial accountability in Nabire Regency. The research method employed is quantitative with a survey approach. Primary data were obtained through the distribution of questionnaires to respondents selected using purposive sampling techniques within local government agencies directly involved in managing the Special Autonomy Fund, namely the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Nabire Regency. Data analysis was conducted using multiple linear regression with EViews software.

The results of the study indicate that, partially, the management of the Special Autonomy Fund budget has a positive and significant effect on financial accountability (sig. 0.044 < 0.05). Meanwhile, the transparency of local government agency performance does not have a significant effect on financial accountability (sig. 0.521 > 0.05). The coefficient of determination (R^2) value of 0.189 shows that only 18.9% of the variation in financial accountability can be explained by the independent variables, while the remaining is influenced by other factors outside the research model. The implication of this study is the importance of enhancing the effectiveness of Special Autonomy Fund management as a strategic fiscal instrument in regional development. Furthermore, performance transparency must be accompanied by stronger oversight systems and implementation mechanisms to contribute meaningfully to improving financial accountability.

Keywords: Special Autonomy Fund Management, Performance Transparency, Financial Accountability, Local Government.

PENDAHULUAN

Pada periode 2021–2024, Kabupaten Nabire menerima alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan tren peningkatan signifikan, dari Rp45,7 miliar di tahun 2021 hingga Rp181 miliar di tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan transisi kebijakan dari UU No. 21 Tahun 2001 ke UU No. 2 Tahun 2021, serta penerapan sistem block grant dan specific grant yang menekankan pembangunan layanan dasar dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

Total Dana Otsus selama empat tahun mencapai lebih dari Rp500 miliar, menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan Papua Tengah. Namun, penelitian terdahulu oleh Djabu (2023) mengungkap tantangan implementasi seperti koordinasi antarlembaga, pemahaman regulasi, dan keterbatasan SDM. Upaya peningkatan kapasitas dan sinergi kelembagaan telah dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Laporan LKPJ Bupati Nabire Tahun 2023 menunjukkan realisasi PAD sebesar Rp127,66 miliar (171,51% dari target) dan pendapatan transfer Rp1,34 triliun (97,82% dari target), termasuk Dana Otsus dan DTI sebagai komponen penting pembangunan.

Penelitian oleh Rumere et al. (2023) menekankan bahwa evaluasi dan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja keuangan, sedangkan perencanaan tidak. Hal ini memperkuat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.

Secara konseptual, transparansi kinerja dan akuntabilitas keuangan merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel mampu membangun kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan dana, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan Dana Otsus dan transparansi kinerja terhadap akuntabilitas keuangan di Kabupaten Nabire.

Pada periode 2021–2024, Kabupaten Nabire menerima alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan tren peningkatan signifikan, dari Rp45,7 miliar di tahun 2021 hingga Rp181 miliar di tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan transisi kebijakan dari UU No. 21 Tahun 2001 ke UU No. 2 Tahun 2021, serta penerapan sistem block grant dan specific grant yang menekankan pembangunan layanan dasar dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

Total Dana Otsus selama empat tahun mencapai lebih dari Rp500 miliar, menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan Papua Tengah. Namun, penelitian terdahulu oleh Djabu (2023) mengungkap tantangan implementasi seperti koordinasi antarlembaga, pemahaman regulasi, dan keterbatasan SDM. Upaya peningkatan kapasitas dan sinergi kelembagaan telah dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Laporan LKPI Bupati Nabire Tahun 2023 menunjukkan realisasi PAD sebesar Rp127,66 miliar (171,51% dari target) dan pendapatan transfer Rp1,34 triliun (97,82% dari target), termasuk Dana Otsus dan DTI sebagai komponen penting pembangunan.

Penelitian oleh Rumere et al. (2023) menekankan bahwa evaluasi dan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja keuangan, sedangkan perencanaan tidak. Hal ini memperkuat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.

Secara konseptual, transparansi kinerja dan akuntabilitas keuangan merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel mampu membangun kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan dana, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan Dana Otsus dan transparansi kinerja terhadap akuntabilitas keuangan di Kabupaten Nabire.

KAJIAN LITERATUR

Teori Otonomi Daerah Teori otonomi daerah menekankan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola anggaran, termasuk Dana Otsus, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah** Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran publik. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat pengawasan publik, serta mencegah penyalahgunaan anggaran. **Pengelolaan Dana Otonomi Khusus** Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021, Dana Otsus Papua harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelayanan dasar, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Namun, penelitian Yuliana (2023) menunjukkan bahwa penggunaan dana lebih banyak berfokus pada pembangunan fisik, sementara dampak pada pendidikan dan kesehatan masih rendah. **Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah** Transparansi adalah keterbukaan informasi publik mengenai pengelolaan anggaran. Penelitian Setiawan & Yuliana (2018) serta Supriyadi & Darmawan (2020) menunjukkan bahwa transparansi anggaran memiliki potensi meningkatkan akuntabilitas, namun hanya jika didukung sistem pengawasan yang kuat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Pengelolaan Dana Otsus yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Pengelolaan anggaran yang baik dan transparan memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk mengevaluasi secara jelas penggunaan dana tersebut, sehingga meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pengelolaan dana otonomi khusus memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Dana ini diberikan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik khusus

dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam praktiknya, efektivitas pengelolaan dana otonomi khusus tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pada bagaimana pemerintah daerah menjalankan pengawasan dan transparansi dalam penggunaannya. Akuntabilitas keuangan daerah sangat berkaitan dengan sistem pengelolaan anggaran yang baik, di mana setiap alokasi dana harus disusun dengan perencanaan yang matang, didukung oleh sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, serta dilaporkan secara berkala kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memiliki sistem pengawasan keuangan yang kuat lebih mampu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana otonomi khusus.

H1 : Pengelolaan dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah

Pengaruh Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah daerah Terhadap akuntabilitas Keuangan.

Transparansi kinerja mengacu pada keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran dan hasil program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dan lembaga pengawas dapat mengevaluasi secara langsung penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian oleh Ramadhan & Putra (2022) menunjukkan bahwa transparansi dalam kinerja pemerintah daerah berhubungan langsung dengan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Masyarakat yang mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka akan lebih mudah melakukan pengawasan, sehingga meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana.

Selain itu, Hadi & Lestari (2023) juga mengemukakan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran akan meningkatkan efisiensi dan mencegah pemborosan atau penyalahgunaan dana. Bardhan (2013) menambahkan bahwa transparansi dalam laporan keuangan dan kinerja pemerintah sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Pengelolaan Dana Otsus yang transparan, misalnya, memungkinkan publik untuk mengevaluasi apakah dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran. Penelitian Yulia & Arif (2024) mengonfirmasi bahwa laporan keuangan yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki akuntabilitas keuangan daerah.

H2 : Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah yang secara langsung mengelola dana tersebut serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran.

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling (pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria). Teknik ini digunakan karena fokus penelitian adalah pada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung dan keterlibatan dalam pengelolaan Dana Otsus serta transparansi kinerja instansi pemerintah daerah yang

berhubungan dengan akuntabilitas keuangan di Kabupaten Nabire. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data, yaitu data primer. Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Otsus dan transparansi kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Nabire, Yaitu Bappeda Kabupaten Nabire, Sumber pengumpulan data menggunakan kuisioner, kuisioner disusun berdasarkan indikator penelitian yang relevan, kemudian dibagikan kepada responden untuk memperoleh data primer secara langsung serta studi dokumentasi, Dokumentasi yang dikumpulkan akan memberikan data tambahan terkait perencanaan dan pelaporan penggunaan dana.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Definisi

Pengukuran variabel dilakukan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator teoritis dan penelitian terdahulu. Setiap variabel dioperasionalkan menjadi beberapa indikator dan diukur menggunakan skala Likert 1–5.

1. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Menggambarkan efektivitas penggunaan Dana Otsus oleh pemerintah daerah. Indikator meliputi:

1. Kesesuaian dengan rencana anggaran
2. Efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan
4. Digitalisasi sistem pengelolaan
5. Transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan
6. Efisiensi penggunaan dana
7. Deteksi penyalahgunaan anggaran Skala Likert: 1 (Sangat Tidak Efektif) hingga 5 (Sangat Efektif)

2. Transparansi Kinerja

Menilai keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Indikator meliputi:

1. Keterbukaan informasi anggaran
2. Dampak terhadap kepercayaan publik
3. Aksesibilitas laporan keuangan
4. Frekuensi publikasi
5. Peran media Skala Likert: 1 (Sangat Tidak Transparan) hingga 5 (Sangat Transparan)

3. Akuntabilitas Keuangan Mengukur tanggung jawab dan kepatuhan pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Indikator meliputi:

1. Kesesuaian pelaporan dengan standar
2. Audit independen
3. Sanksi atas pelanggaran
3. Partisipasi publik
4. Kepercayaan masyarakat
5. Pengawasan internal Skala Likert: 1 (Sangat Tidak Akuntabel) hingga 5 (Sangat Akuntabel).

Pengukuran variabel dilakukan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator teoritis dan penelitian terdahulu. Setiap variabel dioperasionalkan menjadi beberapa indikator dan diukur menggunakan skala Likert 1–5.

1. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Menggambarkan efektivitas penggunaan Dana Otsus oleh pemerintah daerah. Indikator meliputi:

1. Kesesuaian dengan rencana anggaran
2. Efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan
3. Digitalisasi sistem pengelolaan
4. Transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan
5. Efisiensi penggunaan dana
6. Deteksi penyalahgunaan anggaran Skala Likert: 1 (Sangat Tidak Efektif) hingga 5 (Sangat Efektif)

2. Transparansi Kinerja Menilai keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Indikator meliputi:

1. Keterbukaan informasi anggaran
2. Dampak terhadap kepercayaan publik
3. Aksesibilitas laporan keuangan
4. Frekuensi publikasi
5. Peran media Skala Likert: 1 (Sangat Tidak Transparan) hingga 5 (Sangat Transparan)

3. Akuntabilitas Keuangan Mengukur tanggung jawab dan kepatuhan pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Indikator meliputi:

1. Kesesuaian pelaporan dengan standar
2. Audit independen
3. Sanksi atas pelanggaran
4. Partisipasi publik
5. Kepercayaan masyarakat
6. Pengawasan internal Skala Likert: 1 (Sangat Tidak Akuntabel) hingga 5 (Sangat Akuntabel)

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Ghozali (2021) menjelaskan bahwa uji statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, dan mendeskripsikan data baik secara numerik maupun visual.

Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2021), penting untuk melakukan serangkaian uji guna memastikan bahwa model regresi linier yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar dalam analisis regresi. Pelanggaran terhadap asumsi-asumsi ini dapat mengakibatkan hasil analisis regresi menjadi tidak valid atau bias.

Uji Normalitas

Dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov untuk mengevaluasi apakah residual berdistribusi normal. Data dianggap normal jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05.

Uji Multikolinearitas

Menggunakan nilai Tolerance dan VIF untuk mendeteksi korelasi antar variabel independen.

$Tolerance < 0,10 \rightarrow$ indikasi multikolinearitas

$VIF > 10 \rightarrow$ indikasi multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Dilakukan dengan scatterplot residual terhadap nilai prediksi. Pola menyebar atau mengumpul menunjukkan potensi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menggunakan Durbin-Watson (DW) untuk mendeteksi hubungan antar residual.

$DW \approx 2 \rightarrow$ tidak ada autokorelasi

DW mendekati 0 $\rightarrow$ autokorelasi positif

DW mendekati 4 → autokorelasi negative

Analisis Regresi Linear Berganda

Digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Model: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$ Keterangan:

Y: Akuntabilitas Keuangan

X₁: Pengelolaan Dana Otsus

X₂: Transparansi Kinerja

ε : Error

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menilai seberapa besar variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R² mendekati 1 menunjukkan model yang baik.

Uji Statistik F

Menilai pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

F-hitung > F-tabel atau p-value < 0,05 → signifikan

F-hitung ≤ F-tabel atau p-value ≥ 0,05 → tidak signifikan

Uji Statistik t

Menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial.

t-statistik > 1,96 → signifikan

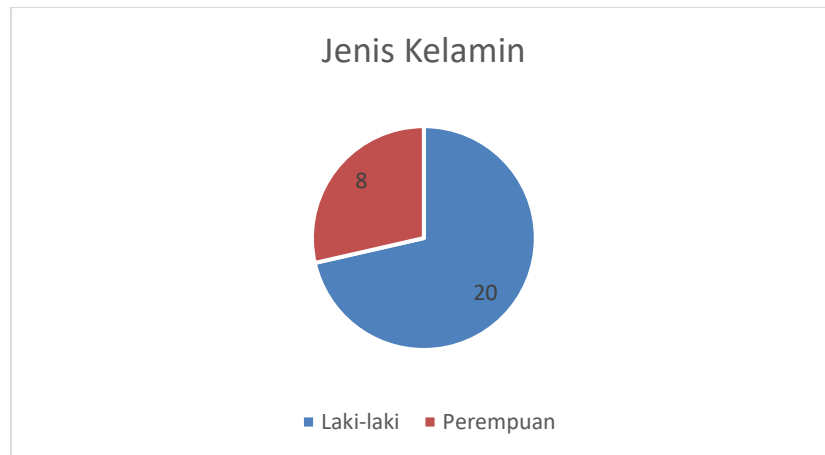
t-statistik ≤ 1,96 → tidak signifikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Data

Penelitian ini melibatkan 28 responden dengan karakteristik beragam (jenis kelamin, usia, pendidikan). Data dianalisis menggunakan software EViews melalui uji asumsi klasik, regresi linear berganda, serta uji F, uji t, dan Durbin-Watson. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan ringkasan model untuk menunjukkan hubungan antarvariabel yang diteliti.

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

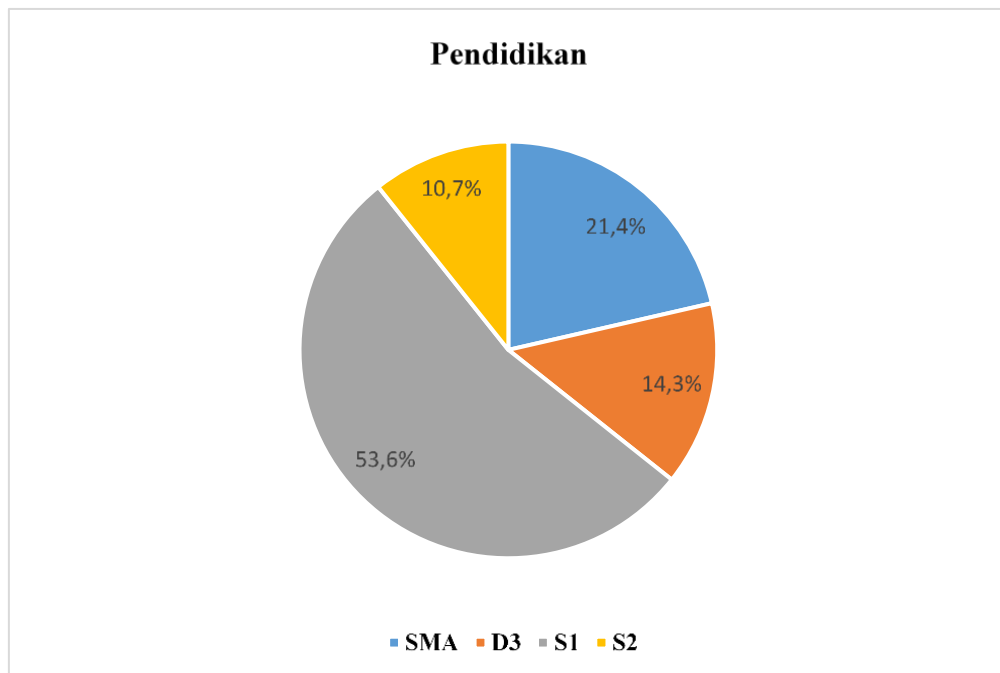


Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian ini melibatkan 28 responden dengan komposisi 20 laki-laki dan 8 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki, sehingga dominasi jenis kelamin memengaruhi representasi dalam penelitian.

a. Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut adalah responden berdasarkan jenjang pendidikan

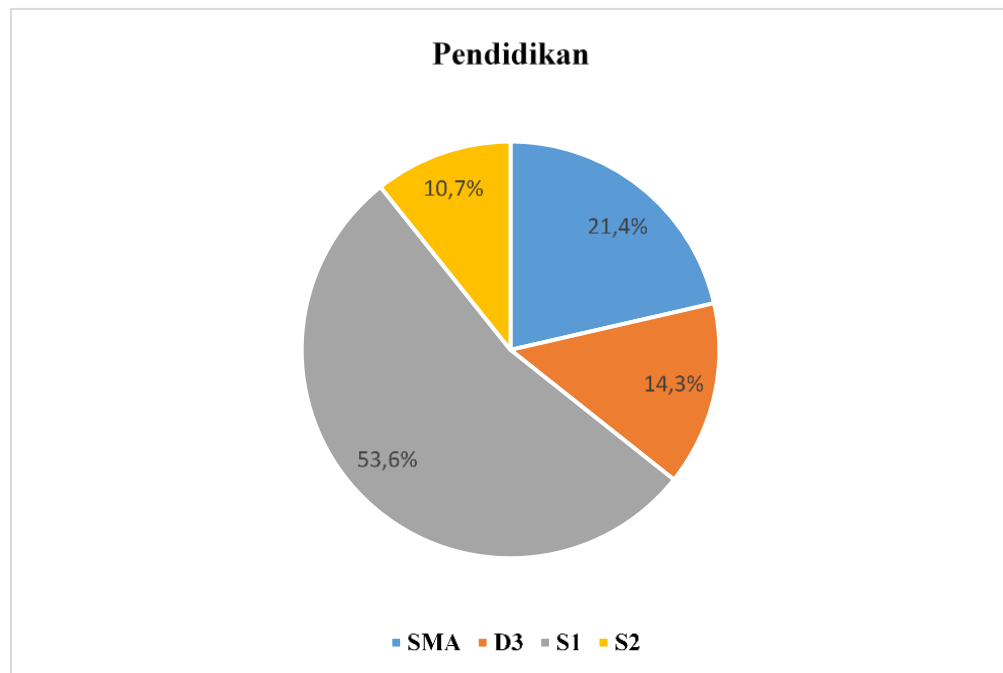


Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan S1 dengan persentase 53,6%. Selanjutnya, responden berpendidikan SMA sebesar 21,4%, D3 sebesar 14,3%, dan S2 sebesar 10,7%. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi, khususnya strata satu, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman dan jawaban yang lebih mendalam serta relevan terhadap pertanyaan penelitian.

a. Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut adalah responden berdasarkan jenjang pendidikan



Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan S1 dengan persentase 53,6%. Selanjutnya, responden berpendidikan SMA sebesar 21,4%, D3 sebesar 14,3%, dan S2 sebesar 10,7%. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi, khususnya strata satu, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman dan jawaban yang lebih mendalam serta relevan terhadap pertanyaan penelitian.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu mengungkap data yang sesuai dengan konsep yang diteliti.

Correlations						
		Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus	Transparansi kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Akuntabilitas Keuangan	Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus	Pearson Correlation	1	.230	.419*	.000	.268
	Sig. (2-tailed)		.239	.026	1.000	.168
	N	28	28	28	28	28
Transparansi kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Pearson Correlation	.230	1	.210	.000	.055
	Sig. (2-tailed)	.239		.282	1.000	.780
	N	28	28	28	28	28
Akuntabilitas Keuangan	Pearson Correlation	.419*	.210	1	.900**	.008
	Sig. (2-tailed)	.026	.282		.000	.966
	N	28	28	28	28	28
Unstandardized Residual	Pearson Correlation	.000	.000	.900**	1	-.115
	Sig. (2-tailed)	1.000	1.000	.000		.562
	N	28	28	28	28	28
Unstandardized Residual	Pearson Correlation	.268	.055	.008	-.115	1
	Sig. (2-tailed)	.168	.780	.966	.562	
	N	28	28	28	28	28

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus (X1) memiliki nilai korelasi 0,419 dengan signifikansi 0,026 ($<0,05$) sehingga dinyatakan valid. Sementara itu, variabel Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (X2) memiliki nilai korelasi 0,210 dengan signifikansi 0,282 ($>0,05$) sehingga tidak valid.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	28	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	28	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.577	5

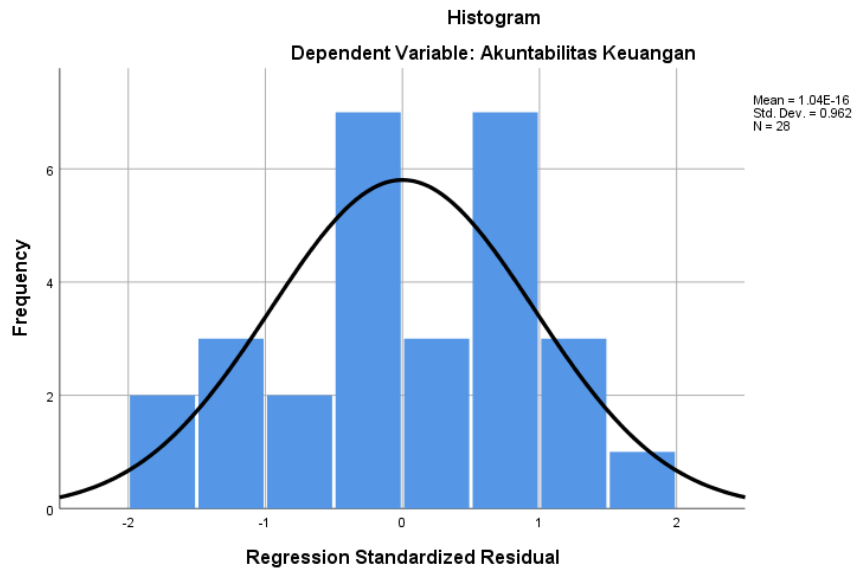
Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,577 dengan jumlah item 5. Nilai ini berada di bawah batas umum 0,70, sehingga reliabilitas instrumen dapat dikategorikan rendah atau kurang konsisten.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah metode untuk menilai apakah data residual dalam model regresi terdistribusi normal.

Histogram

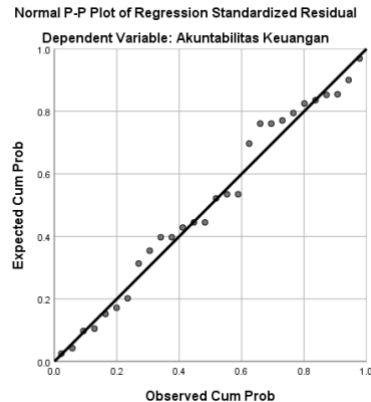
Histogram uji normalitas adalah grafik yang digunakan untuk melihat apakah data residual dalam analisis regresi berdistribusi normal atau tidak.



Histogram menunjukkan puncak distribusi yang menggunung di tengah dengan sebaran data yang menurun secara bertahap ke arah kiri dan kanan, mencerminkan bentuk kurva lonceng (bell-shaped).

Uji P-Plot Normalitas

P-Plot Normalitas adalah salah satu uji grafik yang digunakan untuk melihat apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal.



Gambar 4.5 Hasil Uji P-Plot Normalitas

Hasil uji normalitas dengan Normal P-P Plot menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut.

Uji Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	28

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.95968319
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.071
	Negative	-.126
Test Statistic		.126
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Gambar 4.6 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai VIF (*Variance Inflation factor*).

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.993	.761		2.620	.015		
	Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus	.347	.164	.391	2.116	.044	.947	1.056
	Transparansi kinerja Instansi Pemerintah Daerah	.113	.173	.120	.650	.521	.947	1.056

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah pengujian untuk mengetahui apakah terdapat korelasi (hubungan) antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.435 ^a	.189	.125	.99733	1.819

a. Predictors: (Constant), Transparansi kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Gambar 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

Hasil Model Summary menunjukkan nilai $R = 0,435$ yang berarti hubungan antara variabel independen (transparansi kinerja instansi pemerintah daerah dan pengelolaan anggaran dana otonomi khusus) dengan akuntabilitas keuangan berada pada tingkat sedang.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua atau lebih variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y).

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.435 ^a	.189	.125	.99733

a. Predictors: (Constant), Transparansi kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Gambar 4.9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel Model Summary, diperoleh nilai $R = 0,435$ yang menunjukkan adanya hubungan sedang antara variabel prediktor (transparansi kinerja instansi pemerintah daerah dan pengelolaan anggaran dana otonomi khusus) dengan variabel dependen (akuntabilitas keuangan).

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.812	2	2.906	2.921	.072 ^b
	Residual	24.867	25	.995		
	Total	30.679	27			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

b. Predictors: (Constant), Transparansi kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus

Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai $F = 2,921$ dengan signifikansi $0,072$. Karena nilai sig. lebih besar dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu transparansi kinerja instansi pemerintah daerah dan pengelolaan anggaran dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Uji T

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.993	.761		2.620	.015		
	Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus	.347	.164	.391	2.116	.044	.947	1.056
	Transparansi kinerja Instansi Pemerintah Daerah	.113	.173	.120	.650	.521	.947	1.056

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Gambar 4.10 Hasil Uji T

Berdasarkan tabel Coefficients, variabel Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus memiliki nilai $t = 2,116$ dengan signifikansi $0,044 < 0,05$, sehingga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sebaliknya, variabel Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah memiliki nilai $t = 0,650$ dengan signifikansi $0,521 > 0,05$, sehingga tidak berpengaruh signifikan. Nilai VIF untuk kedua variabel sekitar $1,056$, menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Dengan demikian, hanya pengelolaan anggaran dana otonomi khusus yang terbukti berkontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan dalam model regresi ini.

KESIMPULAN

Penelitian di Bappeda Nabire menunjukkan bahwa responden mayoritas laki-laki usia produktif dengan pendidikan S1, sehingga dinilai mampu memberikan penilaian terhadap transparansi, pengelolaan dana otsus, dan akuntabilitas keuangan. Model regresi memenuhi syarat statistik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), namun kontribusi variabel independen terhadap akuntabilitas keuangan tergolong rendah ($R^2 = 0,189$). Artinya, sebagian besar variasi dipengaruhi oleh faktor lain seperti SDM, pengawasan internal, dan budaya birokrasi. Uji F menunjukkan bahwa transparansi dan pengelolaan dana otsus secara simultan tidak berpengaruh signifikan. Namun, uji T membuktikan bahwa hanya pengelolaan dana otsus yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, sedangkan transparansi tidak. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan daerah lebih ditentukan oleh pengelolaan anggaran yang efektif daripada transparansi formal tanpa dukungan pengawasan dan partisipasi publik. Tata kelola keuangan yang akuntabel tetap menjadi pilar utama good governance.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R., & Rini, S. (2023). *Kompetensi Aparatur Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus*

- Bardhan, P. (2013). *Decentralization and Development: Theory and Evidence*. Journal of Economic Literature, 48(2), 135–156.
- Djabu, M. (2023). *Implementasi Otonomi Khusus dan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Nabire*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. (2024). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Dampaknya terhadap Keuangan Daerah*.
- Herlina, L., et al. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Aksesibilitas, Pengendalian, dan Kompetensi Aparatur*.
- Herlina, R., Sari, M., & Putri, A. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Publik, 9(2), 55–67.
- Husodo, A. (2019). *Transparansi Anggaran dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Dana Otonomi Khusus di Wilayah Otonomi dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Keuangan*.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasution, H. W. (2024). *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Perspektif Sistem dan Fungsi*.
- Nasution, H. W. (2024). *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pratama, D., & Fitriani, A. (2017). *Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Medan*.
- Putra, A., & Sari, D. (2023). *Peran Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus*. Jurnal Akuntansi Daerah, 15(1), 88–100.
- Putra, B., & Sari, D. (2023). *Peran Pengawasan Internal dan Eksternal dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otsus*.
- Ramadhan, F., & Putra, A. (2022). *Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Keuangan*.
- Rantepulung, O., Mollet, J. A., & Ratang, W. (2023). *Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otsus di Papua*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua*.

- Setiawan, I., & Yuliana, T. (2018). *Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kota Bandung*.
- Sukmadinata, N. S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi, A., & Darmawan, A. (2020). *Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah di Jawa Barat*.
- Sutrisno. (2022). *Pengaruh Transparansi Dana Otsus terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*.
- Sutrisno. (2022). *Pengaruh Transparansi Dana Otsus terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(3), 112–125.
- Syafruddin. (2017). *Transparansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik di Era Desentralisasi*.
- Wibowo, R., & Anisa, L. (2024). *Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*.
- Widiastuti, D. (2017). *Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Yulia, D., & Arif, S. (2024). *Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Publik*.
- Yuliana. (2023). *Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan di Papua Tengah*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(4), 201–219.
- Yuliana. (2023). *Evaluasi Pengelolaan Dana Otsus dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik di Papua Tengah*.
- Yulianto, B., & Indah, N. (2022). *Pengaruh Pengelolaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kota Surabaya*.